

## SKRIPSI

**PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI MASYARAKAT  
DALAM FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT  
DENGAN PP NO. 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**



AN 29 / 05

Pra

P



**HARYA PRABUDI**

**NIM. 030.111.213.U**

**MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ABDI MASYARAKAT  
DALAM FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT  
DENGAN PP NO. 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN  
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Pembimbing,**



**Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 133 944**

**Penyusun,**



**Harya Prabudi**  
**NIM. 030.111.213.U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

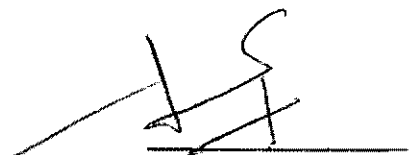
**Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.**



**Anggota : 1. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**



**2. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**



**3. Dedy Sutrisno, S.H., M.Hum.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

1. Menurut PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, memaparkan akan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam penerapannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Terlepas dari itu semua, bahwa dalam prosedur pelayanan masyarakat oleh pegawai negeri sipil haruslah sesuai ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan dalam instansi kedinasan masing-masing. Maka dalam pelayanannya kepada masyarakat oleh pegawai negeri sipil tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain yaitu masyarakat.
2. Dalam bentuk tanggung jawab akan tugas yang telah dibebankannya, termasuk dalam bidang pekerjaan ataupun kehidupan pribadi pegawai negeri itu sendiri, adalah sebuah hal yang perlu dipikirkan kembali. Sebenarnya masalah pungutan liar dapat menjadi bomerang bagi dia sendiri karena tidak menghiraukan akan dampak yang diterimannya. Meskipun begitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang sengaja melakukan penyimpangan khususnya dalam bentuk pungutan secara tidak sah.

## SARAN

1. Dengan semakin bertambahnya kasus pungutan secara tidak sah dalam proses pelayanan oleh pegawai negeri kepada masyarakat. Seharusnya negara melakukan pembenahan yang menyeluruh atas masalah tersebut. Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan kebijakan, dan sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan dan memberi sanksi yang lebih berat apabila ada seorang pegawai negeri yang melakukan pungutan secara tidak sah (pungutan liar) dalam prosesnya melayani masyarakat
2. Untuk mengurangi kasus penyimpangan terhadap pungutan liar, memang melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah melalui lembaga kepegawaian dan masyarakat selaku pihak yang akan menilai kinerja pegawai negeri secara langsung dan melakukan pengawasan yang dalam bentuknya dibuat badan atau lembaga tersendiri. Dan kalau memungkinkan di setiap kantor pelayanan publik di cantumkan keterangan akan prosedur pengurusan dan biaya retribusi suatu pengurusan serta ditambahkan akan pelarangan bagi pegawai negeri sipil dan bagi masyarakat yang dalam melakukan proses pengurusan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan akan mendapat hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu akan membuat pegawai negeri tersebut jera dan mempersempit ruang gerak terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran.